

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Indikator efektivitas menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta menurunnya angka putus sekolah selama periode 2020–2024. Berbagai program bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan pendidikan daerah, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi sekolah. Namun demikian, masih terdapat kendala pada jenjang SMA/ sederajat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, peserta didik yang memilih bekerja, dan pernikahan usia dini.
2. Indikator efisiensi menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan serta dukungan sarana dan prasarana telah mampu menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Anggaran dimanfaatkan untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta bantuan pendidikan bagi peserta didik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sekolah yang memerlukan peningkatan fasilitas dan pemerataan sarana pendidikan.

3. Indikator kecukupan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan layanan pendidikan formal dan nonformal melalui keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Keberadaan PKBM memberikan kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dapat terpenuhi.
4. Indikator pemerataan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berupaya memberikan akses pendidikan yang merata melalui penyediaan satuan pendidikan formal dan nonformal, bantuan pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Meskipun demikian, pemerataan kualitas layanan pendidikan antarwilayah masih perlu terus ditingkatkan, khususnya pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.
5. Indikator responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan respons terhadap berbagai permasalahan pendidikan melalui pelaksanaan bantuan pendidikan, pendataan anak tidak sekolah, penguatan layanan pendidikan nonformal, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor dalam menangani faktor-faktor penyebab putus sekolah masih perlu diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

6. Indikator ketepatan menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Program yang dilaksanakan mampu meningkatkan akses pendidikan, membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta memberikan alternatif pendidikan melalui PKBM. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan fasilitas, dan penguatan program pencegahan putus sekolah masih diperlukan agar tujuan Program Wajib Belajar 12 Tahun dapat tercapai secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan berjalan cukup baik. Program telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan penurunan angka putus sekolah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada pemerataan layanan pendidikan, penguatan pendidikan nonformal, serta pencegahan putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus meningkatkan upaya pencegahan angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SMA/ sederajat, melalui pendampingan peserta didik yang berisiko putus

sekolah, penguatan program bantuan pendidikan, serta peningkatan koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, dan orang tua peserta didik.

2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, sehingga seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas.
3. Dinas Pendidikan diharapkan memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pendidikan nonformal semakin dikenal sebagai alternatif penyelesaian pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah.
4. Perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya dalam menangani faktor-faktor penyebab putus sekolah, seperti kemiskinan, pernikahan usia dini, dan anak yang bekerja.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), serta mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan Program Wajib Belajar 12 Tahun sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Ali, M. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: Menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(3), 1–12.
- Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Aprianti, A., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan pendidikan: Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2023). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro Tahun 2023. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro Tahun 2024. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024). Bojonegoro Dalam Angka 2024. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2024. Jakarta: BPS RI.
- Beritajatim.com. (2026, Februari 25). DPRD Soroti Pernikahan Dini dan Perceraian di Bojonegoro. Diakses dari: <https://beritajatim.com/dprd-soroti-pernikahan-dini-dan-perceraian-di-bojonegoro>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewey, J. (1944). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York: The Free Press.
- Diana, A. V., Afifuddin, & Septina, D. R. (2025). Evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. *Jurnal Respon Publik*, 19(4), 10–18.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi Kedua).

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Fajar, A. M. (2009). Pendidikan sebagai hak asasi manusia dalam perspektif pembangunan bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 1–10.
- GoodStats Data. (2024, November 15). Simak angka putus sekolah 2023/2024. Diakses dari: <https://data.goodstats.id/statistic/simak-angka-putus-sekolah-20232024-rAG4M>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. MIT Press.
- Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2021). Implementasi wajib belajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1064–1077.
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228–239. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar ilmu pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (dalam Moleong, L. J., 2017). *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2012). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin*. Bojonegoro.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. (2025). *Pernikahan dini: Ketika kemiskinan dan putus sekolah dorong anak Bojonegoro ke pelaminan*. Diakses dari: <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip->

publikasi/arsip-seputar-perkara/559

- Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. (2025). Total 395 anak menikah dini di Bojonegoro pada 2024, 72 anak hamil di luar nikah ajukan disk. Diakses dari: <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/472>
- Radar Bojonegoro. (2023, April 6). Angka partisipasi sekolah naik, meski belum 100 persen. Diakses dari: <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711325267>
- Sekaran, U. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwati, E., Kesuma, B. A., Ariani, & Unsiyah, F. (2023). Menekan angka putus sekolah dan pernikahan dini. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(3), 678–689. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i3.20501>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Ketiga)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, M., Malombasi, & Tuwu, D. (2020). Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan dan Publik (JKPP)*, 3(1). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/view/11528>
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilak, J. B. G. (2002). Education and national development. *International Journal of Educational Development*, 22(2), 159–173. [https://doi.org/10.1016/S0738-0593\(01\)00016-X](https://doi.org/10.1016/S0738-0593(01)00016-X)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 tentang Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the gridlock*. New York: UNDP.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Yuliwati, Y. (2022). Wajib belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2),

